



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDE PRIANA
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 432276

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.575.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/54 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/54 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **276.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOPPY F1C02N28LO A/T/SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 RS CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, ROYAL ENFIELD BULLET CLASSIC 500 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 119.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **36.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **40.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.927.000.000**

III. HUTANG **Rp.** **580.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.347.000.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.